

PROFIL PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI STANDAR ISI MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SMP/MTS DI KOTA SEMARANG

Bambang Hartono
Universitas Negeri Semarang

Abstrak

KTSP disusun berdasarkan paradigma baru, yaitu perubahan dari paradigma keilmuan ke paradigma kompetensi lulusan. Paradigma baru itu harus diimplementasikan di sekolah agar terjadi peningkatan mutu pendidikan, termasuk mutu pembelajaran bahasa Indonesia. Permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana permasalahan yang dihadapi guru, (2) bagaimana permasalahan yang dihadapi siswa kaitannya dengan kesiapannya untuk mengikuti proses pembelajaran yang berbasis penguasaan kompetensi? (3) bagaimana tanggapan/persepsi dan partisipasi guru lain dan kepala sekolah terhadap guru bahasa tersebut? (4) bagaimana cara analisis dan pemecahan masalah yang ditemukan, dan (5) bagaimana mengembangkan mekanisme kerja sama antarinstansi? Subjek percontohan dalam penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia, siswa, dan kepala SMP/MTs di Kota Semarang di 10 sekolah. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu (1) pengumpulan data untuk menjangkau kondisi penguasaan kurikulum/standar isi tenaga kependidikan di SMP/MTs Kota Semarang dalam pengembangan dan pelaksanaan standar isi dan (2) penyusunan silabus, pengembangan RPP, dan peningkatan kualitas pembelajaran guru. Analisis data menggunakan metode analisis kontekstual dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian secara umum standar isi belum sepenuhnya diimplementasikan di sekolah. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya kemampuan guru dalam hal (1) pemahaman dan penguasaan tentang standar isi, (2) kemampuan menyusun silabus, (3) kemampuan menyusun rencana pembelajaran, (4) kemampuan melaksanakan pembelajaran berorientasi kompetensi siswa dan pemahaman pembelajaran secara kontekstual dan inovatif, (5) kemampuan memilih dan menyiapkan bahan pembelajaran, dan (6) kemampuan melaksanakan penilaian berbasis kelas dan tindak lanjut dari penilaian tersebut. Rekomendasi dari hasil penelitian standar isi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia perlu intensitas pelatihan yang terkontrol dan terukur kepada guru dengan pendampingan yang kontinu dan beresinambungan.

Kata Kunci: standar isi, silabus, pembelajaran kontekstual, pembelajaran inovatif, penilaian berbasis kelas

Pendahuluan

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional telah mengembangkan kurikulum baru untuk SD/MI hingga SMU/MA, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP disusun berdasarkan paradigma baru, yaitu perubahan dari paradigma keilmuan ke paradigma kompetensi lulusan. KTSP ini dihadirkan karena pelaksanaan kurikulum terdahulu, yaitu kurikulum 1994 mengalami berbagai kendala dan tantangan, antara lain kurangnya kemampuan profesional para guru, kesiapan sarana dan prasarana penunjang, keterbatasan kemampuan pendanaan, dan berbagai hambatan lainnya. Kurikulum 1994 kurang mengakomodasikan kemampuan mencerna konteks-konteks perubahan yang sangat cepat terjadi pada masa kini. Atas dasar ini, dipandang wajar bila kurikulum 1994 direformasi melalui pola pikir yang mudah dimengerti, yaitu pembekalan kemampuan dasar yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan secara leluasa sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Dimunculkannya KTSP ini sekaligus menjawab tuntutan lapangan dan masyarakat yang menghendaki perampingan kurikulum 1994. Tuntutan ini didasarkan adanya berbagai keluhan yang diungkapkan para guru dan

tenaga kependidikan lainnya serta para pakar dan pemerhati pendidikan bahwa kurikulum sangat padat bahkan terlalu padat. Di samping itu, target kurikulum yang dicantumkan dalam kurikulum 1994 dinilai sebagai akar terjadinya kemerosotan kualitas pendidikan secara bertahap (*gradual*) dan berkesinambungan tanpa henti. Guru dipaksa meneruskan penyajian topik (**baca: butir pembelajaran**) berikutnya kendatipun (hampir) semua siswa belum memahami dan menguasai topik yang sedang diberikan. Alhasil, siswa digiring guru untuk maju ke topik berikut, dan maju lagi ke topik berikutnya lagi, tanpa pemahaman pengetahuan dasar dari topik-topik terdahulu. Akibatnya, siswa yang belum atau tidak memahami topik dasar semakin tidak memahami topik berikut dan tambah semakin tidak memahami topik berikutnya lagi, dan seterusnya. Dengan kata lain, guru berkurang topik, siswa bergerak maju (**baca: mundur**) dari kurang memahami menjadi semakin tidak memahami dan maju terus sampai menjadi sama sekali tidak mampu memahami materi topik yang disajikan. Kualitas pembelajarannya maju (**baca: mundur**) terus dari kurang rendah, sedikit rendah, sangat rendah, dan sangat rendah sekali sejalan dengan semakin tidak dipahaminya topik-topik secara *gradual* tersebut. Kurikulum 1994 dengan penetapan target inilah yang dipandang sebagai puncak upaya pemerintahan terdahulu

mengadakan “pembodohan sistematis” terhadap rakyat dan bangsa Indonesia (Silverius 2002:9).

Selain itu, dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negeri terdapat perkembangan dan perubahan dan dalam tatanan kehidupan global terdapat isu-isu mutakhir dari luar negeri perlu disikapi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

KTSP dirancang pelaksanaannya di tahun 2006/2007 untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, mulai SD/MI hingga SMU/MA. Pemberlakuan KTSP ini diharapkan akan mampu memberikan obat bagi terpuruknya pendidikan di negeri ini. Harapan idealnya, dengan KTSP itu semua peserta didik akan memiliki kompetensi setelah menamatkan pendidikannya. Harapan ini merupakan tanggapan terhadap hasil pendidikan kita yang tidak memiliki kompetensi yang mampu memberikan unggulan kompetitif (Suyanto 2003).

SMP/MTs adalah jenis dan jenjang pendidikan dasar yang berperan sebagai pondasi. Selain berperan mengembangkan ilmu, SMP/MTs juga dituntut mengembangkan kepribadian anak. Karena itu, agar pelaksanaan KTSP di SMP/MTs itu mampu memenuhi harapan di atas, perlu adanya persiapan semua komponen persekolahan, seperti guru, kepala sekolah, sarana prasarana pendukung, dan komponen yang lain yang terkait. Pertanyaan yang muncul apakah

SMP/MTs itu sudah memiliki persiapan dalam mengembangkan dan melaksanakan KTSP? Untuk menjawab permasalahan ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan kesiapan SMP/MTs di Kota Semarang mengembangkan dan melaksanakan KTSP yang terperinci: (1) bagaimana permasalahan yang dihadapi guru? (2) bagaimana permasalahan yang dihadapi siswa kaitannya dengan kesiapannya untuk mengikuti proses pembelajaran yang berbasis penguasaan kompetensi? (3) bagaimana tanggapan/persepsi dan partisipasi guru lain dan kepala sekolah terhadap guru bahasa tersebut? (4) bagaimana cara analisis dan pemecahan masalah yang ditemukan? dan (5) bagaimana mengembangkan mekanisme kerja sama antarinstansi?

Tinjauan Pustaka

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang terefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Puskur 2002:1). Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten. Artinya, seseorang itu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Konsep kompetensi ini digunakan dalam kurikulum baru didasarkan pada pemikiran: (1)

kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks, (2) kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa untuk menjadi kompeten, (3) kompeten merupakan hasil belajar (*learning outcome*) yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran, dan (4) kehandalan kemampuan siswa melakukan sesuatu harus didefinisikan secara jelas dan luas dalam suatu standar yang dapat dicapai melalui kinerja yang dapat diukur (Puskur 2002:1).

Berdasarkan pengertian kompetensi di atas, KBK dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan kemampuan daerah. Karena itu, **KBK berorientasi** pada (1) hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna dan (2) keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. **Rumusan kompetensi** dalam KBK merupakan pernyataan ***apa yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa*** dalam setiap tingkatan kelas dan sekolah dan sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara bertahap dan

berkelanjutan untuk menjadi kompeten.

KBK memiliki ciri-ciri (1) menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, (2) berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, (3) penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, (4) sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif, dan (5) penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi (Puskur 2002:1-2).

Untuk mewujudkan hasil pendidikan bermutu tersebut diperlukan kompetensi dasar tamatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks lokal, nasional, dan global. Peningkatan mutu pendidikan secara nasional memerlukan standar mutu pendidikan nasional yang memuat kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa di seluruh Indonesia. Dengan demikian, melalui KBK yang berdiversifikasi, keanekaragaman kemampuan daerah dilayani dengan berpijak pada standar nasional kompetensi dasar tamatan. Menurut Puskur (2001) kerangka KBK dapat digambarkan sebagai berikut.



Fokus hasil pendidikan yang bermutu adalah siswa yang sehat, mandiri, berbudaya, berakhlak mulia, beretos kerja, berpengetahuan dan menguasai teknologi, serta cinta tanah air. Untuk mewujudkan siswa dengan ciri-ciri tersebut perlu dikembangkan kurikulum berdasarkan aspek-aspek: **(1) diversifikasi kurikulum, (2) standar nasional, (3) kurikulum berbasis kompetensi dasar, (4) empat pilar pendidikan kesejagatan, (5) partisipasi masyarakat, dan (6) manajemen berbasis sekolah** (Puskur 2001).

Pengimplementasian standar isi di sekolah dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan (1) pengembangan silabus dan (2) penyusunan rencana

pembelajaran (*desain intructional*). Pengembangan standar isi di sekolah lebih lanjut yang harus dilakukan adalah pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus KTSP mengadaptasi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Adapun prinsip pengembangan silabus KBK mengikuti prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dari pusat hingga ke daerah dan sekolah (Puskur 2002). Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan silabus, yaitu sekolah (guru), dinas pendidikan kab/kota, dinas pendidikan propinsi, dan pusat (depdiknas) dituntut peran dan tanggung jawabnya (Puskur 2002).

Silabus merupakan seperangkat rencana dan pelaksanaan pembelajaran beserta penilainnya. Karena itu, silabus harus disusun secara sistematis dan berisikan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk memenuhi target pencapaian kompetensi dasar. Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui dalam menyusun silabus, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) perbaikan, (4) pemantapan, dan (5) penilaian silabus (Puskur 2002).

Rencana pembelajaran merupakan jabaran lebih lanjut dari silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) biasanya disusun untuk satu kali pertemuan. Untuk mampu menyusun RPP ini, guru perlu mendalami, menguasai, dan menggunakan kompetensi dasar dengan baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan RPP, guru harus menjabarkan indikator. Adapun syarat umum dalam merumuskan indikator pembelajaran [dulu tujuan pembelajaran khusus (TIK)] berdasarkan taksonomi Bloom, yakni aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif: (1) berorientasi pada siswa, (2) merupakan hasil belajar, (3) spesifik dan jelas, dan (4) dapat diamati dan diukur. Selanjutnya, syarat khusus yang perlu diperhatikan adalah ABCD. A berarti audience, yakni, siapa yang belajar; B adalah behavior, pengalaman apa yang akan diperoleh; C adalah condition, yakni, dalam kondisi yang bagaimana siswa mencapai hasil belajar; dan D singkatan dari Degree, yakni dalam

tingkatan mana siswa mencapai hasil belajar.

Keberhasilan pengimplementasian standar isi di sekolah sangat ditentukan oleh kepala sekolah dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menselaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong saekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu mengambil keputusan dan prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah.

Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah harus mampu memobilisasi sumber daya sekolah dalam kaitannya dengan perencanaan dan evaluasi program sekolah, pengembangan kurikulum, pembelajaran, pengelolaan ketenagaan, sarana dan sumber belajar, keuangan, pelayanan siswa, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan penciptaan iklim sekolah.

Selain kepala sekolah, guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan implementasi standar isi di sekolah, bahkan sangat menentukan keberhasilannya peserta didik dalam belajar. Dalam pelaksanaan KTSP, seorang guru perlu: (1) memahami dan menguasai

bahan dan hubungannya dengan bahan lain dengan baik, (2) menyukai apa yang diajarkannya dan menyukai mengajar sebagai suatu profesi, (3) memahami peserta didik, pengalaman, kemampuan, dan prestasinya, (4) menggunakan metode dan variasi dalam mengajar, (5) mampu mengeliminasi bahan-bahan yang kurang penting dan kurang berarti, (6) selalu mengikuti perkembangan pengetahuan mutakhir, (7) proses pembelajaran selalu dipersiapkan, (8) mendorong peserta didiknya untuk memperoleh hasil yang lebih baik, dan (9) menghubungkan pengalaman yang lalu dengan bahan yang akan diajarkan (Mulyana 2002:182-187).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk pelaksanaan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai sasaran: (1) deskripsi pola dan profil guru SMP/MTs di Kota Semarang dalam pemahaman, pengembangan silabus, dan RPP dalam rangka pelaksanaan standar isi di sekolah dan (2) pola dan profil kepala SMP/MTs di Kota Semarang dalam pemenuhan perangkat silabus, RPP, dan kualitas pembelajaran guru bahasa Indonesia di sekolah.

Subjek percontohan dalam penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia, siswa, dan kepala SMP/MTs di Kota Semarang di 10 sekolah. Ke-10 sekolah itu dipilih secara variatif, baik negeri

maupun swasta dari sekolah berkategori rintisan, potensial, dan standar (nasional maupun bertaraf internasional). Subjek percontohan penelitian ini diambil dengan teknik pengambilan sampel bertujuan, yaitu dengan menentukan wilayah yang menjadi subjek percontohan penelitian. Wilayah tersebut telah dipertimbangkan dapat mewakili tingkatan sekolah di Kota Semarang, yang sekaligus juga mencerminkan kehidupan budaya masyarakat.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu (1) pengumpulan data untuk menjangkau kondisi penguasaan kurikulum/standar isi tenaga kependidikan di SMP/MTs Kota Semarang dalam pengembangan dan pelaksanaan standar isi dan (2) penyusunan silabus, pengembangan RPP, dan peningkatan kualitas pembelajaran guru. Untuk penyediaan data kondisi penguasaan kurikulum/standar isi tenaga kependidikan SMP/MTs Kota Semarang digunakan tiga macam metode, yakni: (1) tes, (2) metode simak, dan (3) metode cakap, yang masing-masing penerapannya dijabarkan dengan teknik-teknik yang menjadi bawahannya. Teknik-teknik bawahan yang dimaksud mencakup dua macam, yakni (1) teknik dasar dan (2) teknik lanjutan.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tes (isian cek), pedoman wawancara, pedoman observasi, dan angket. Pedoman wawancara berisikan

pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kepala sekolah dan guru yang meliputi 5 aspek, yaitu (1) konsep kurikulum/standar isi, (2) strategi yang dilakukan dalam mengembangkan silabus, RPP, dan pembelajaran, (3) langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan silabus, RPP, dan pembelajaran, (4) hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penyusunan silabus, RPP, dan pembelajaran, dan (5) model yang sekiranya diterapkan dalam mengembangkan silabus, RPP, dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kontekstual dengan teknik deskriptif kualitatif. Metode analisis kontekstual adalah metode analisis yang diterapkan pada data dengan mendasarkan, memperhitungkan, dan mengaitkan dengan konteks. Konteks itu didefinisikan sebagai daerah/wilayah dan sosial budaya SMP/MTs tersebut ada. Data penelitian dianalisis secara deskripsif-kualitatif artinya data yang terkumpul dideskripsikan dengan menggunakan rangkaian kata-kata. Adapun langkah-langkah analisis data penelitian ini meliputi: (1) mengumpulkan data; (2) mengorganisasi dan mengelompokkan data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat dan kategori data yang ada (Langkah ini juga sebagai langkah reduksi data dan sekaligus penyajian data. Untuk menghindari data yang bisa dilakukan pemeriksaan keabsahan/kesahihan

data melalui empat kriteria, yaitu *derajat kepercayaan, keteralihan, ketergan-tungan, dan kepastian*); dan (3) analisis data dilakukan melalui empat tahap, yakni reduksi data, sajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi penelitian yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Artinya, empat komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi penelitian dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data (Miles dan Huberman 1984). Berdasarkan pembahasan dan analisis data akan diambil simpulan tentang strategi yang diterapkan dan hambatan yang dialami sekolah dalam mengembangkan dan melaksanakan standar isi SMP/MTs.

Hasil Dan Pembahasan

Pada bagian berikut akan dipaparkan hasil penelitian sekaligus pembahasan penelitian yang mencakupi hal-hal: (1) deskripsi penguasaan dan implementasi standar isi oleh guru bahasa Indonesia SMP/MTs di Kota Semarang, (2) deskripsi kesiapan siswa mengikuti proses pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi, (3) deskripsi alternatif pemecahan masalah/kendala, dan 4) deskripsi pengembangan mekanisme kerja sama antarinstansi dalam peningkatan implementasi standar isi di sekolah.

Deskripsi Penguasaan dan Implementasi Standar Isi Guru Bahasa Indonesia SMP/MTs di Kota Semarang

Pada bagian ini akan dipaparkan kondisi/profil guru SMP/MTs, terutama yang berkaitan dengan: (1) pemahaman dan penguasaan tentang standar isi, (2) kemampuan menyusun silabus, (3) kemampuan menyusun rencana pembelajaran, (4) kemampuan melaksanakan pembelajaran berorientasi kompetensi siswa dan pemahaman pembelajaran secara kontekstual dan inovatif, (5) kemampuan memilih dan menyiapkan bahan pembelajaran, dan (6) kemampuan melaksanakan penilaian berbasis kelas dan tindak lanjut dari penilaian tersebut.

a. Pemahaman dan Penguasaan Guru tentang Standar Isi

Berdasarkan hasil penelitian, guru masih ragu dalam mengimplementasikan standar isi, seperti menjalankan pembelajaran dan evaluasi, seperti yang seharusnya dilakukan pada standar isi. Peneliti berkesimpulan guru belum memahami aspek pembelajaran dan penialain yang seharusnya dilakukan pada standar isi ini. Hal ini dibuktikan dari sejumlah guru SMP/MTs yang dijadikan subjek penelitian, mayoritas guru (95 %) menyatakan memahami dan menguasai standar isi mata pelajaran bahasa Indonesia dengan baik, sebagian kecil (5 %) menyatakan belum menguasai dengan baik.

Berdasarkan pengamatan peneliti, semua sekolah yang dijadikan objek penelitian telah memiliki panduan dan pedoman umum tentang KBK. Akan tetapi, sebagian guru menyatakan bahwa panduan untuk penyelenggaraan matapelajaran bahasa Indonesia cukup jelas, sebagai menyatakan kurang jelas. Untuk guru yang menyatakan jelas karena mereka aktif di MGMP, tetapi ada guru yang menyatakan kurang jelas karena pedoman dianggap terlalu umum, sementara dalam pembelajaran bahasa Indonesia sudah bersifat teknis. Dalam pembelajaran guru lebih banyak berimprovisasi, seperti bagaimana membelajarkan bahasa Indonesia dengan CTL dan sesuai dengan KBK. Perlu instrumen untuk mengukur CTL dan KBK yang jelas apakah telah terlaksana atau belum, sebagai instrumen untuk mengamati di kelas secara langsung.

b. Kemampuan Guru Menyusun Silabus

Mayoritas (95 %) guru menyatakan telah mampu menyusun silabus, sedangkan 5 % guru menyatakan belum yakin benar telah mampu menyusun silabus. Akan tetapi, silabus yang disusun guru adalah silabus yang hasil susunan MGMP Kota Semarang yang kemudian dikopi untuk sekolah-sekolah. Silabus itu kemudian dinyatakan sebagai silabus guru di sekolah (silabus sekolah). Mereka melakukan pengembangan silabus

tanpa memperhatikan karakteristik sekolah. Hal ini dibuktikan dengan silabus yang ada di sekolah. Hal ini seperti diungkapkan oleh responden berikut ini.

“Ya, gimana mau mengembangkan silabus sesuai sekolah, di MGMP sudah menyusun silabus dan tes saja kita bersama. Saya tidak tahu cara menembangkan silabus yang sesuai sekolah karena ya silabus begitu. Sekolah tidak memberikan penekanan apa untuk sekolahnya. Saya juga bingung bagaimana cara mngembangkan silabus yang sesuai ciri sekolah. Ya saya, selain belum bisa juga hanya dituntut menyusun silabus. Begitu disusun dan disampaikan ya sudah. Itu kira sudah benar.”

Guru yang menyatakan belum sepenuhnya mampu menyusun silabus bila dilihat dari segi pendidikan, mereka telah lulus S1, baik lulusan reguler maupun penyeteraan. Kondisi lain yang menyebabkan mereka tidak menyusun silabus dengan baik karena mereka belum pernah mengikuti penataran khusus penyusunan silabus (yang diikuti sosialisasi pelatihan penyusunan silabus di MGMP) dan kebanyakan mereka kurang informasi. Mereka tidak dituntut menyusun silabus yang sesuai dengan kondisi sekolah. Selain itu, pimpinan sekolah tidak memberikan arahan cara menyusun silabus yang sesuai visi dan misi sekolah. Hal itu

seperti diungkapkan responden sebaagi berikut.

“Ya, gimana mas. Kami belum pernah mengikuti penataran khusus penyusunan silabus selain di MGMP. Ya itu kan kebijakan pemerintah (Depdiknas) pusat. Biasanya, sampainya di daerah dan sekolah itu lama banget. Di kegiatan MGMP pada waktu kegiatan MGMP yang dibicarakan dibicarakan ya itu silabus dan kemudian diberi contoh.”

Dari 95% guru yang sudah menjalankan penyusunan silabus sesuai kondisi sekolah hanya 10%. Guru ini telah berusaha menyusun silabus dengan menyesuaikan kondisi sekolah. Guru ini ada di sekolah swasta berkategori sekolah maju (sekolah favorit). Mereka diharapkan oleh pimpinan sekolahnya untuk berusaha mengembangkan silabus yang sesuai sekolahnya. Mereka telah diberi pengarahan untuk pengembangan silabus. Mereka telah berusaha mengembangkan silabus apa pun bentuknya. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah seorang responden sebagai berikut.

“Ya, saya sebagai guru di sekolah swasta dituntut untuk bekerja keras mengikuti kebijakan sekolah. Kalau tidak gimana saya? Karena sekolah ini ingin mengembangkan silabus yang memiliki ciri khusus, kami--para guru di sini, dituntut menjalan-

kannya, sebisa saya, termasuk juga dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, tadi sebisa saya dan ya tidak tahu itu yang diharapkan atau tidak.”

Kondisi sekolah mereka yang melaksanakan pengembangan silabus sendiri memang mendukung. Misalnya, pimpinan sekolah memang menghendaki guru agar selalu mengikuti perkembangan pembelajaran dan mengikutkan guru-guru untuk mengikuti pelatihan, seminar atau penataran-penataran yang berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah satu kepala sekolah sebagai berikut.

“Sekolah kami, sebagai sekolah swasta, bila tidak mengikuti perkembangan yang ada akan ketinggalan. Kalau bisa sekolah kami lebih maju dan lebih dahulu menjalankan kebijakan pemerintah (Depdiknas) dibanding sekolah negeri. Misalnya ada kebijakan tertentu dari pemerintah (Depdiknas), seperti pengembangan silabus sesuai ciri khusus sekolah, sekolah kami sudah menerapkan lebih dahulu dibandingkan dengan sekolah negeri. Bila sekolah kami tidak menerapkan lebih dahulu, sekolah kami tidak mempunyai nilai tambah. Karena tidak mempunyai nilai tambah sekolah kami tidak dilirik oleh masyarakat. Akibatnya, yang masuk ke sekolah ini sedikit. Bagaimana kami bisa hidup kalau

yang masuk sedikit, sementara kami hanya bisa hidup dari siswa. Oleh karena itu, kami harus berjuang keras untuk tampil beda dan lebih cepat.”

c. Kemampuan Guru Menyusun RPP

Kondisi kemampuan guru menyusun RPP tidaklah berbeda dengan kondisi menyusun silabus. Mayoritas (95 %) guru menyatakan telah mampu menyusun RPP, sedangkan 5 % guru menyatakan belum yakin benar telah mampu menyusun RPP. Akan tetapi, RPP yang disusun guru adalah RPP hasil penyusunan MGMP Kota Semarang yang kemudian dikopi untuk sekolah-sekolah. RPP itu kemudian dinyatakan sebagai RPP guru di sekolah (silabus sekolah). Mereka melakukan penyusunan RPP tanpa memperhatikan karakteristik KD. Hal ini dibuktikan dengan RPP yang ada di sekolah. Hal ini seperti diungkapkan oleh responden berikut ini.

“Ya, gimana mau menyusun RPP sesuai sekolah, di MGMP sudah menyusun RPP dan tes saja kita bersama. Saya tidak tahu cara menyusun RPP yang sesuai KD karena ya RPP begitu. Sekolah tidak memberikan penekanan apa untuk sekolahnya. Saya juga bingung bagaimana cara menyusun RPP yang sesuai KD. Ya saya, selain belum bisa juga hanya dituntut menyusun RPP. Begitu disusun dan disampaikan ya sudah dan tidak

mendapat masukan. Itu kira sudah benar.”

Guru yang menyatakan belum sepenuhnya mampu menyusun RPP bila dilihat dari segi pendidikan, mereka S1, baik lulusan reguler maupun penyetaraan. Kondisi lain yang menyebabkan mereka tidak menyusun RPP dengan baik karena mereka belum pernah mengikuti penataran khusus penyusunan RPP (yang diikuti sosialisasi pelatihan penyusunan silabus di MGMP) dan kebanyakan mereka kurang informasi. Mereka tidak dituntut menyusun RPP yang sesuai dengan kondisi sekolah. Selain itu, pimpinan sekolah tidak memberikan arahan cara menyusun silabus yang sesuai visi dan misi sekolah. Hal itu seperti diungkapkan responden sebaagi berikut.

“Ya, gimana mas. Kami belum pernah mengikuti penataran khusus penyusunan RPP selain di MGMP. Di kegiatan MGMP pada waktu kegiatan MGMP yang dibicarakan dibicarakan ya itu RPP dan kemudian diberi contoh.”

Dari 95 % guru yang sudah menjalankan penyusunan RPP sesuai kondisi sekolah hanya 10 %. Guru ini telah berusaha menyusun RPP dengan menyesuaikan kondisi sekolah. Guru ini ada di sekolah swasta berkategori sekolah maju (sekolah favorit). Mereka diharapkan oleh pimpinan sekolahnya untuk berusaha menyusun RPP yang

sesuai KD-nya. Mereka telah diberi pengarahan untuk penyusun RPP. Mereka telah berusaha menyusun RPP apa pun bentuknya. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah seorang responden sebagai berikut.

“Ya, saya sebagai guru di sekolah swasta dituntut untuk bekerja keras mengikuti kebijakan sekolah. Kalau tidak gimana saya? Karena sekolah ini ingin mengembangkan RPP yang memiliki ciri khusus dan sesuai KD, kami--para guru di sini, dituntut menjalankannya, sebisa saya, termasuk juga dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, tadi sebisa saya dan ya tidak tahu itu yang diharapkan atau tidak.”

Kondisi sekolah mereka yang melaksanakan penyusunan RPP sendiri memang mendukung. Misalnya, pimpinan sekolah memang meng-hendaki guru agar selalu mengikuti perkembangan pembelajaran dan mengikutkan guru-guru untuk mengikuti pelatihan, seminar atau penataran-penataran yang berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah satu kepala sekolah sebagai berikut.

“Sekolah kami, sebagai sekolah swasta, bila tidak mengikuti perkembangan yang ada akan ketinggalan. Kalau bisa sekolah kami lebih maju dan lebih dahulu menjalankan kebijakan pemerintah (Depdiknas) dibanding sekolah negeri. Misalnya ada kebijakan

tertentu dari pemerintah (Depdiknas), seperti penyusunan RPP sesuai KD, RPP harus menggambarkan apa yang akan dijalankan dalam pembelajaran nanti. Sekolah kami sudah menerapkan hal itu. Bila sekolah kami tidak menerapkan hal itu, sekolah kami tidak bisa maju karena guru sumber utama. Karena itu, guru harus mengembangkan perencanaan pembelajaran sesuai kurikulum (KD) yang akan dibelajarkan. Wajib itu. Kami melakukan pembinaan.”

c. Kemampuan Guru Melaksanakan Pembelajaran Berorientasi Kompetensi Siswa dan Pemahaman Pembelajaran secara Kontekstual dan Inovatif

Dalam hal pelaksanaan pembelajaran di kelas, ditemukan guru-guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia belum fokus pada kompetensi yang dibelajarkan, terutama pada KD. Ditemukan guru-guru yang “menyimpang” dari KD. Walaupun guru-guru itu telah lulus S1, baik lulusan reguler maupun penyeteraan.

Guru-guru yang belum dapat menjalankan pembelajaran dengan baik menyatakan tidak pernah diikuti oleh pimpinan sekolah untuk mengikuti kegiatan penataran dan kebanyakan mereka kurang informasi. Mereka jarang dicek apakah KD dan proses pembelajarannya sudah sesuai apa belum. Selain itu, pimpinan sekolah

tidak memberikan arahan cara pembelajaran berbasis kompetensi. Hal itu seperti diungkapkan responden sebaagi berikut.

“Ya, gimana mas. Kami belum pernah mengikuti penataran cara mengintegrasikan budi pekerti ke dalam mata pelajaran. Ya itu kan kebijakan pemerintah (Depdiknas) pusat. Biasanya, sampainya di daerah dan sekolah itu lama banget. Di kegiatan Gugus dan Dabin saja pada waktu kegiatan KKG belum pernah dibicarakan hal itu. Ya saya belum bisa menjalankannya. Lha mengajarkan bahasa Jawanya saja susah. Apalagi harus ditambah dengan mengintegrasikan budi pekerti, ya lebih susah lagi.”

Sebaliknya, sejumlah 2 guru (5,56%) mengaku telah berusaha melaksanakan pembelajaran dengan baik. Guru SMP/MTs yang telah berusaha menerapkan pembelajaran dengan baik adalah guru-guru yang mengajar di sekolah swasta berkategori sekolah maju (sekolah favorit). Mereka diharapkan oleh pimpinan sekolahnya untuk berusaha mengimplentasikan kurikulum (KD) dalam setiap pembelajarannya. Mereka telah diberi pengarah dan pembinaan. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah seorang responden sebagai berikut.

“Ya, saya sebagai guru di sekolah swasta dituntut untuk bekerja keras mengikuti kebijakan

sekolah. Kalau tidak gimana saya? Karena sekolah ini ingin mengembangkan pembelajaran yang bermutu. Kami, para guru di sini, dituntut menerapkannya di kelas dan kami coba jalankan pada mata pelajaran saat kami mengajar, sebisa saya. Ya, tadi sebisa saya dan ya tidak tahu itu yang diharapkan atau tidak.”

Kondisi sekolah mereka yang melaksanakan pembelajaran dengan baik memang mendukung. Misalnya, pimpinan sekolah memang menghendaki guru agar selalu mengikuti perkembangan pembelajaran dan mengikutkan guru-guru untuk mengikuti pelatihan, seminar atau penataran-penataran yang berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah satu kepala sekolah sebaagi berikut.

“Sekolah kami, sebagai sekolah swasta, bila tidak mengikuti perkembangan yang ada akan ketinggalan. Kalau bisa sekolah kami lebih maju dan lebih dahulu menjalankan kebijakan pemerintah (Depdiknas) dibanding sekolah negeri. Misalnya ada kebijakan tertentu dari pemerintah (Depdiknas), seperti pelaksanaan kurikulum baru di sekolah, sekolah kami sudah menerapkan lebih dahulu dibandingkan dengan sekolah negeri. Bila sekolah kami tidak menerapkan lebih dahulu, sekolah kami tidak mempunyai nilai tambah. Karena

tidak mempunyai nilai tambah sekolah kami tidak dilirik oleh masyarakat. Akibatnya, yang masuk ke sekolah ini sedikit. Bagaimana kami bisa hidup kalau yang masuk sedikit, sementara kami hanya bisa hidup dari siswa. Oleh karena itu, kami harus berjuang keras untuk tampil beda dan lebih cepat.”

e. Kemampuan Guru Memilih dan Menyiapkan Bahan Pembelajaran

Dalah hal kemampuan memilih dan menyiapkan bahan ajar, guru melakukannya (1) ada yang dengan tim, (2) guru dan siswa, dan (3) ada pula yang hanya guru. Kendala yang dihadapi guru dalam memilih dan menyiapkan bahan ajar adalah banyak buku-buku yang belum sesuai dengan standar isi dan kedalaman materi buku masih kurang.

f. Kemampuan Melaksanakan Penilaian Berbasis Kelas dan Tindak Lanjut dari Penilaian

Kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian berbasis kelas (PBK) dideskripsikan: (1) penilaian direncanakan saat pembuatan RP, saat menentukan alokasi waktu bersamaan dengan melihat kompetensi dasar, dan disesuaikan dengan indikator, dan saat menyusun pengembangan sistem penilaian; (2) bentuk tugas/soal yang digunakan esai dan pilihan ganda, tugas individu dan kelompok, penilaian proses dan penilaian hasil,

demonstrasi, portfolio, dan angket; (3) aspek yang dinilai meliputi aspek kognitif, psikomotor, dan afektif; (4) minimum ketuntasan belajar bahasa Indonesia bervariasi, ada yang 65%, dan ada yang 85%; (5) pendekatan penilaian yang sesuai penilaian proses dan hasil yang disesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan dicapai; dan (6) hasil yang diperoleh digunakan untuk laporan kepada orang tua, tolok ukur ketuntasan belajar, tolok ukur keberhasilan PBM, dan tindak lanjut remedial dan pengayaan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dapat dirumuskan simpulan pelaksanaan evaluasi di sekolah sebagai berikut. Penilaian pembelajaran ada yang dilakukan setiap kompetensi dasar, setiap tema yang mewadahi beberapa kompetensi dasar, dan ada pula yang beberapa tema yang digabungkan. Alasan tergantung jenis penilaiannya. Jika penilaian dilakukan secara lisan dapat dilakukan pada setiap kompetensi dasar, tetapi untuk pertanyaan tulisan dilakukan setiap tema. Jenis-jenis penilaian, seperti portfolio, asesmen kinerja belum dilakukan secara penuh karena masih ada guru yang bingung menggunakannya.

Tugas-tugas yang diberikan terutama latihan soal, tugas lain seperti membuat karangan belum sepenuhnya diberikan, serta membuat alat peraga belum diberikan karena tergantung dari materi yang sedang dipelajari.

Bentuk tes yang digunakan semuanya, bentuk esai, dan mengarang dari keterangan responden bentuk ini dipilih karena dianggap yang sesuai dengan KBK. Bentuk objektif agak jarang diberikan. Karena itu, dalam hal evaluasi petugas meluruskan bahwa dalam KBK digunakan ragam strategi dalam melakukan penilaian dan evaluasi sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator hasil belajar yang ingin dicapai.

Semua responden menyatakan semua ranah dievaluasi, tetapi setelah petugas memberikan pertanyaan lanjut ternyata guru masih kesulitan dalam menilai ranah afektif dan psikomotor. Ranah kognitif yang dilakukan dalam kognitif juga hanya sampai pada taraf pengetahuan, pemahaman dan aplikasi. Guru masih belum membuat evaluasi pada taraf analisis, sintesis, dan evaluasi.

Kriteria ketuntasan belajar ada yang menyatakan di atas 75%, ada yang menyatakan di atas 65%. Perbedaan ini karena hasil musyawarah MGMP yang disesuaikan dengan situasi setempat. Semua guru menyatakan bahwa dari kriteria yang dibuat ternyata ketuntasan belajar belum tercapai.

Dalam melakukan penilaian, pendekatan yang dilakukan ada dua yaitu PAP dan PAN. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi, artinya jika nilai yang diperoleh siswa rata-rata tinggi, penilaian menggunakan PAP, sebaliknya jika hasilnya kurang baik penilaian mengacu pada PAN. Dengan

demikian, secara umum dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti guru guru masih ragu untuk menentukan jenis penilaian atau evaluasi yang seharusnya dilakukan yang sesuai dengan KBK, misalnya bagaimana menilai dengan penilaian yang outentik.

Berdasarkan pengamatan peneliti, ditemukan beberapa siswa yang belum mencapai ketuntasan belum tertangani melalui kegiatan remedial. Buktinya masih banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar hingga mereka mengakiri waktu belajar dalam semester tersebut. Guru tidak menjalankan remedial karena keterbatasan waktu dan juga siswa kesulitan menentukan waktu karena banyaknya materi yang belum tuntas. Siswa kalau dalam kondiisi seperti ini cenderung *stres*.

Kesiapan Siswa Mengikuti Proses Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kom-petensi

Pada bagian ini dideskripsi dan dibahas permasalahan yang dihadapi siswa kaitannya dengan kesiapannya untuk mengikuti proses pembelajaran yang berbasis penguasaan kompetensi. Uraian pada bagian ini dibagi atas (1) kesiapan siswa mengikuti proses pembelajaran dan (2) kendala/hambatan yang dihadapi dalam mengikuti proses pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi.

Hasil wawancara terhadap siswa di sekolah yang dikunjungi semuanya

menyatakan bahwa guru telah menjelaskan kompetensi yang harus dicapai, waktu pembelajaran menurut siswa dianggap cukup, guru menjelaskan garis besar tentang yang akan diajarkan pada setiap unit. Buku pelajaran juga cukup memadai dan guru kadang-kadang menggunakan alat peraga dalam mengajar. Hasil pengamatan petugas di lapangan ternyata sumber belajar (buku teks) yang digunakan siswa masih buku teks kurikulum 2004.

Responden siswa pada setiap sekolah yang dikunjungi ternyata merupakan siswa yang memiliki prestasi yang cukup baik karena menduduki rangking di atas 10 besar. Dengan kondisi ini petugas lebih mudah memperoleh informasi di lapangan dan lancar dalam memberikan jawaban. Namun demikian, secara tidak formal petugas juga mewawancarai beberapa siswa pada saat pembelajaran di kelas. Secara umum mereka dapat menerima pembelajaran dengan baik.

Siswa memahami bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia telah menggunakan kurikulum KBK diperoleh dengan cara diberi tahu oleh gurunya. *Secara persis siswa belum mengetahui apa itu KBK*. Pembelajaran terjadi sangat tergantung dari skenario yang dibuat oleh guru, siswa tinggal mengikuti.

Kendala yang dihadapi siswa dalam mengikuti pembelajaran KBK di sekolah (1) tidak mengerti apa yang dimaksud

guru; (2) pemahaman bacaan dan kelancaran membaca, mengartikan kata, dan peribahasan, menyimak, menulis, dan membaca cepat, serta berbicara di depan kelas; dan (3) kadang merasa kesulitan dalam menemukan pokok pikiran bacaan jika tidak diberitahukan oleh guru terlebih dahulu..

Untuk mengatasi kesulitan seperti di atas, biasanya bertanya pada teman atau guru, atau belajar lebih giat lagi. Karena itu siswa memberikan saran supaya guru lebih memperhatikan jika siswanya mengalami kesulitan

Persepsi Guru Mata Pelajaran Lain, Kepala Sekolah, dan Pengawas terhadap Guru Bahasa Indonesia dan Pencarian Upaya Membantu Pengembangan Guru Bahasa Indonesia dalam Rangka Implementasi Standar Isi

Pada bagian berikut dideskripsi dan dibahas topik persepsi/tanggapan guru lain dan kepala sekolah terhadap guru bahasa Indonesia dan pencarian upaya membantu pengembangan guru tersebut dalam rangka implementasi standar isi. Paparan bagian ini terdiri atas (1) persepsi guru, kepala sekolah, dan pengawas terhadap guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan (2) upaya guru, kepala sekolah, dan pengawas membantu guru bahasa Indonesia mengembangkan implementasi standar isi.

Mayoritas guru mata pelajaran lain di sekolah yang menjadi objek penelitian memberikan tanggapan

yang positif (baik) terhadap keberadaan guru bahasa Indonesia. Mayoritas menyatakan bahwa guru bahasa Indonesia dikatakan rajin, memiliki beban berat, dan pekerjaannya banyak.

Mayoritas kepala sekolah di sekolah yang menjadi objek penelitian memberikan tanggapan yang positif (baik) terhadap keberadaan guru bahasa Indonesia. Mayoritas menyatakan bahwa guru bahasa Indonesia dikatakan rajin, memiliki beban berat, dan pekerjaannya banyak.

Pengawas sekolah di sekolah yang menjadi objek penelitian memberikan tanggapan yang positif (baik) terhadap keberadaan guru bahasa Indonesia. Mayoritas menyatakan bahwa guru bahasa Indonesia dikatakan rajin, memiliki beban berat, dan pekerjaannya banyak.

Semua sekolah yang dikunjungi, pihak guru lain dan kepala sekolah memberikan pernyataan dukungan terhadap pengembangan profesionalisme pengajaran bahasa Indonesia. Hal itu diungkapkan sebagai berikut: (1) semua guru diberikan keleluasaan mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia, antara lain dengan mendorong guru untuk aktif di MGMP; (2) semua guru diberi kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi dalam hal memilih metode/teknik mengajar bahasa Indonesia; (3) dukungan untuk melaksanakan KBK (standar isi): tiga responden menyatakan dana tidak

masalah, tetapi satu responden menyatakan bermasalah (dana terkendala); laboratorium bahasa tidak dimiliki oleh tiga sekolah (semua sekolah negeri), hanya dimiliki satu sekolah (sekolah swasta); dan tiga sekolah menyatakan mendapat dukungan alat peraga di samping mendapat bantuan dari pemerintah juga ada yang diusahakan oleh sekolah atau membuat sendiri, satu sekolah mengalami kesulitan; (4) ada tiga guru yang menyatakan pernah dimonitoring dan disupervisi oleh kepala sekolah maupun pengawas. *Rata-rata dua kali dalam setahun* oleh pengawas, dan oleh kepala sekolah lebih sering walaupun tidak formal. Hal-hal yang disupervisi antara lain administrasi, proses pembelajaran dan evaluasi. Akan tetapi, ada juga guru yang tidak pernah dimonitoring, baik oleh pengawas maupun kepala sekolah; dan (5) setelah supervisi ada tiga guru yang menyatakan diberi bimbingan, dan ada satu guru yang menyatakan tidak diberi bimbingan.

Adapun pengawas sekolah yang dikunjungi menyatakan dukungan terhadap guru dan kepala sekolah yang ingin maju. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh pengawas adalah supervisi kepada guru dan kepala sekolah. Supervisi dilakukan dalam satu semester sebanyak 2 kali. Aspek-aspek yang disupervisi meliputi penguasaan materi, metode, teknik dan pendekatan, penggunaan media pembelajaran, juga RPP. Berkaitan

dengan KBK pengawas sedang mempelajari pembuatan silabus yang dibuat guru. Hal-hal yang berkaitan dengan dukungan pengawas sebagai berikut: (1) guru yang disupervisi kadang mengungkapkan permasalahannya seperti pertanyaan bagaimana kurikulum berdiversifikasi tampak dalam pembuatan silabus. Apakah dalam KD bisa ditambahkan? Berkaitan dengan hal ini pengawas memberikan jawaban apa yang ia bisa. Berkaitan dengan ini petugas pengambil data akhirnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengawas untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan KBK; (2) dari pengamatan di lapangan diperoleh kesimpulan bahwa pengawas, bidang studi perlu diberi pembinaan, khususnya materi pembelajaran dan cara penyampaiannya yang sesuai dengan KBK. Pengawas bidang studi perlu mendapat pelatihan berkaitan dengan KBK sehingga ada sinkronisasi antara guru mata pebalajaran dan pengawas bidang studi; dan (3) secara umum pengawas mata pelajaran bahasa Indonesia perlu meningkatkan kemampuannya dalam memahami KBK dan implementasinya di lapangan. Selama ini pemahaman KBK hanya diperoleh melalui diskusi dengan pengawas yang telah memperoleh pelatihan di tingkat nasional yang belum tentu pengawas bidang studi bahasa Indonesia.

Kendala/Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah yang Ditemukan

Pada bagian ini dideskripsi dan dibahas subtopik tentang cara analisis dan pemecahan masalah yang ditemukan, yang mencakup analisis masalah, alternatif pemecahan masalah dan kemungkinan rencana kegiatan yang ditempuh guna mengatasi permasalahan tersebut, terutama berkaitan dengan model sosialisasi, pelatihan, dan bahan pelatihan standar isi yang efektif bagi guru.

Ada banyak kendala yang dihadapi guru SMP/MTs di Kota Semarang dalam mengimplementasikan standar isi. Kendala-kendala tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 6 aspek, yaitu (1) kualitas sumber daya manusia, (2) kondisi sosial ekonomi, (3) buku teks, (4) fasilitas yang tersedia, (5) kondisi sosio-kultural, dan (6) struktural.

a. Kualitas sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang ada untuk dapat merealisasikan harapan pembelajaran dengan mengintegrasikan budi pekerti adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi, antara lain memiliki motivasi tinggi, kompetensi dalam bidangnya, dan memiliki kreativitas yang tinggi. Motivasi merupakan modal dasar yang diperlukan untuk melakukan suatu tindakan. Kesadaran akan suatu kepentingan dan kemauan untuk bertindak dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses belajar mengajar, seperti yang disarankan terkesan tidak

dapat dijalankan. Hal ini dibuktikan dengan proses belajar mengajar yang dilakukan guru masih belum mengintegrasikan budi pekerti. Pembelajaran bahasa Jawa tidak dilakukan dengan mengintegrasikan budi pekerti karena mereka menyatakan “Ya, yang penting saya mengajar”. Mereka ada yang mengatakan “Bagaimana mau mengajar yang baik saja susah apalagi kalau diributkan menyusun silabus dan RPP.”

Selain harus memiliki motivasi yang tinggi, guru harus juga memiliki kompetensi dalam bidangnya. Kompetensi yang dimaksud antara lain guru harus memahami isi kurikulum dan bagaimana menjabarkan untuk mengimplementasikannya.

Pemahaman terhadap isi kurikulum dan menjabarkannya memberikan dorongan untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan siswa yang diajar. Realitas ini belum dapat diwujudkan oleh guru. Guru dalam mengajar masih banyak yang hanya mendasarkan pada buku teks, bukan pada isi kurikulum. Sebanyak 60% dari subjek penelitian tidak melaksanakan pembelajaran dengan mendasarkan pada kurikulum karena hanya mendasarkan pada buku teks yang ada. Mereka ada yang mengatakan “Ya bagaimana mau mengetahui pembelajaran dengan mengikuti kurikulum, buku teks kan sudah ada dan itu katanya sesuai kurikulum (R.GR.02)”.

Selanjutnya guru harus kreatif dalam mengembangkan muatan isi

kurikulum dan proporsinya. Guru harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk mengembangkan bahan pelajaran yang mengarah pada kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan-tantangan pada masa yang akan datang. Harapan ini belum bisa terwujud. Banyak guru yang peneliti temukan, mereka hanya mendasarkan pembelajarannya pada apa yang telah ditentukan oleh hasil kegiatan MGMP. Mereka ada yang mengatakan “Kalau nanti tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh MGMP dipandang menyalahi apa yang telah disepakati. Ya daripada dicap menyimpang lebih baik mengikuti. Ya, apa salahnya (R.GR.03)”.

b. Kondisi Sosial ekonomi

Kondisi sosial ekonomi guru sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Mereka mengatakan “Ya, bagaimana akan mengajarkan bahasa Indonesia dengan baik bila pada saat mengajar masih memikirkan keluarga di rumah nanti harus makan apa (R.GR.05)”. Hal ini disebabkan karena gaji guru yang sampai saat ini masih banyak yang belum memadai, belum lagi adanya potongan-potongan untuk membayar berbagai keperluan, lebih-lebih pada masa krisis ekonomi seperti saat ini, beban guru semakin bertambah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari, sering guru melakukan aktivitas di luar, seperti menjadi pengojek, makelar motor atau mobil, mengelola arisan

motor atau mobil, membuka warung atau toko, berdagang, dan bertani atau berkebun.

Dengan kondisi ini, perhatian guru menjadi bercabang karena mereka di satu sisi harus memikirkan pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya. Di sisi lain, mereka harus memikirkan beban mengajar sebagai guru. Sebagai seorang guru, mereka harus menyiapkan bahan pelajaran, kegiatan administrasi lainnya, dan mengoreksi pekerjaan siswa. Keadaan yang sarat dengan beban pikiran tersebut menyebabkan terpasungnya kreativitas guru untuk membelajarkan siswanya. Guru tidak punya waktu yang cukup untuk berkreasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana yang diharapkan dalam kurikulum 2006. Hal itu seperti disebutkan oleh responden sebagai berikut.

“Apalagi pada masa sekarang, seperti saat ini mas, barang-barang mahal, gaji yang saya peroleh tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kondisi seperti ini paling tidak mempengaruhi kesiapan dan kinerja saya dalam proses belajar mengajar di kelas.” (R.GR.06).

Mereka bahkan ada yang mengatakan “saya pada saat mengajar kadang-kadang masih berpikir bagaimana caranya mencari tambahan mas” (R.GR.10). Kenyataan itu sangat mempengaruhi konsentrasi saat pelaksanaan proses belajar mengajar

berlangsung. Guru tidak dapat berkonsentrasi. Akibatnya, apa yang disampaikan kepada siswa sekenanya. Hal ini mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yang digariskan dalam kurikulum.

c. Buku teks

Buku teks yang ada belum sesuai dengan standar isi. Buku yang ada di sekolah adalah buku Pemkot yang disusun berdasarkan kurikulum 2004. Hal ini seperti dituturkan responden sebagai berikut.

“Ya, bagaimana bisa melaksanakan kegiatan dengan baik mas, wong bukunya saja tidak cocok. Yang ada buku terbitan Pemkot yang disusun berdasarkan kurikulum 2004. Itu saja jumlahnya tidak mencukupi. Tidak semua sekolah mampu menyediakan buku teks untuk sejumlah siswanya walaupun pemerintah telah memberikan buku sekolah elektronik (BSE). Hal ini disebabkan oleh faktor dana yang ada. Ya, bagaimana bisa menyediakan buku untuk siswanya, satu-satunya sumber pembiayaan sekolah, seperti melalui Komite Sekolah sekarang tidak boleh karena sekolah gratis. Sekarang ada BOS tapi alokasi untuk buku masih terbatas.” (R.GR.9).

Dengan demikian, sekolah tidak mampu memenuhi kekurangan buku teks, sedangkan bila meminta siswa untuk membeli buku, untuk sekolah-sekolah di pinggiran kota terasa agak

berat. Hal ini seperti dituturkan responden berikut ini.

“Ya, bagaimana akan meminta mereka membeli buku, *lha wong* untuk sanga saja mereka sulit.” (R.GR.15).

Penyediaan buku teks dengan jumlah yang memadai, lebih-lebih pada masa sekarang (kenaikan BBM), seperti saat ini merupakan salah satu hambatan bagi guru untuk mengembangkan kreativitasnya di dalam proses belajar mengajar. Kondisi ini sangat mempengaruhi proses belajar mengajar bahasa Indonesia yang sangat membutuhkan buku sebagai sarana vital.

Di samping, ketersediannya berbagai jenis buku teks di sekolah akan memberikan peluang bagi guru untuk memilih bahan pelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Buku teks yang ada seharusnya didasarkan pada kondisi lingkungan siswa. Akan tetapi, buku teks yang ada belum didasarkan pada kebutuhan siswa setempat. Buku teks yang ada adalah buku teks yang seragam. Akibatnya, guru harus dapat memilih bahan yang sesuai dengan minat dan kondisi siswa. Karena kondisi gurunya yang kurang mendukung profesionalisme dalam bekerja maka harapan itu tidak tercapai. Profesionalisme tidak terwujud pada guru karena berbagai hal, seperti terkemukakan di atas.

d. Fasilitas yang Tersedia

Fasilitas yang tersedia di sekolah kurang memadai, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana menjadi hambatan guru-guru untuk berkreasi. Adanya berbagai fasilitas yang dimiliki sekolah memberikan peluang bagi guru untuk memilih secara tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran dapat berlangsung menyenangkan dan menarik.

Jenis-jenis fasilitas yang seharusnya dimiliki sekolah antara lain: perpustakaan, surat kabar dan majalah, televisi, alat peraga, dan lingkungan. Fasilitas-fasilitas itu masih terbatas, apalagi surat kabar atau majalah untuk sekolah desa atau pinggiran masih menyedihkan. Kalaupun ada, datangnya ke sekolah itu sudah terlambat atau surat kabar atau majalah terbitan lama. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya dana yang dimiliki sekolah. Hal ini seperti dituturkan responden sebagai berikut.

“Mas, perpustakaan sekolah buku-bukunya kurang memadai apalagi buku bahasa Jawa. Buku-buku yang ada buku paket kiriman dari pemerintah. Sementara buku-buku cerita dan buku-buku lain sangat kurang. Mas bisa lihat sendiri kondisi perpustakaan saja bercampur dengan ruang guru hanya sebatas rak-rak saja, seperti gudang.” (R.GR.07)

e. Kondisi sosio-kultural

Kondisi sosio-kultural juga menghambat pelaksanaan

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Ada sebagian guru yang mengatakan sebagai berikut.

“Kita harus melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan kurikulum 2006. Di dalam kurikulum materi pengajaran bahasa Indonesia tidak berubah. Kalau berubah yang berubah itu urutannya atau materi tertentu dipindahkan pada kelas tertentu. Kalau itu dijalankan akan menghambat pelaksanaan kurikulum 2006.” (R.GR.10)

Guru yang mempunyai anggapan seperti di atas, akhirnya tidak mau menerima perubahan dan mempelajari perkembangan. Mereka hanya melaksanakan tugas apa yang telah berjalan sejak lama. Sikap mereka akhirnya tidak mendukung berhasilnya tujuan adanya perubahan program pembelajaran dan pendidikan.

f. Kondisi Struktural

Hambatan lain yang menyebabkan ketidakterlaksanakannya pengajaran bahasa Indonesia dengan baik adalah hambatan struktural. Hambatan struktural yang sangat dirasakan oleh para guru adalah program itu tidak disertai dengan penyiapan guru untuk melaksanakan program tersebut. Guru belum diberi penataran pembelajaran dengan baik semua. “Mas, apa itu pengajaran bahasa Indonesia yang kreatif dan inovatif dan kontekstual, penataran kurikulum saja terlambat. Itu saja tidak semua guru mendapat-

kan” (R.GR.19). Di samping itu, penataran yang diberikan tidak bersifat operasional, tetapi masih pada tataran teoretis atau konsep. Kebanyakan guru menginginkan penataran yang bersifat praktis. Adapun penataran yang bersifat praktis jarang mereka peroleh. MGMP yang semestinya dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan guru, masih banyak digunakan sebagai sarana *ngerumpi*. “Lha kalau di kegiatan MGMP banyak yang hanya datang dan *ngerumpi*. Ada yang mengatakan, yang penting khan sudah dapat izin dari pimpinan sekolah “ (R.GR.02). Di samping itu, di MGMP sangat terbatas tenaga yang dapat diandalkan. Pembina MGMP adalah guru inti yang dipandang bisa, tetapi bukan guru yang memang memiliki kompetensi dan integritas yang bisa diandalkan. Hal ini berakibat pada pengimbasan pelaksanaan kegiatan MGMP dan penyebaran perubahan dan penyempurnaan kurikulum yang tidak sampai sasaran. Di samping itu, pemilihan guru inti masih dijumpai dengan kriteria yang tidak jelas. Mereka ada yang mengatakan, “Ya, gimana mas kalau pemilihannya saja ditentukan siapa yang dekat dengan pimpinan” (R.GR.03).

Pada bagian berikut akan dideskripsi dan dibahas kendala khusus yang berkaitan dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas.

Kendala/Hambatan-hambatan yang Dihadapi Guru, Kepala Sekolah, dan

Pengawas dalam Pengimplementasian Standar Isi

Hambatan yang dihadapi guru dan sekolah dalam mengimplementasikan standar isi bahasa Indonesia di sekolah: (1) belum semua guru memahami KBK secara utuh sehingga susah untuk diskusi dan pengimplementasiannya secara penuh di sekolah, terutama guru yang tidak ditatar; (2) guru dan sekolah menghadapi keterbatasan dana; (3) jumlah siswa dalam satu kelas yang cukup banyak, lebih dari 40, sangat menyulitkan jika pembelajaran terpusat pada siswa. Apalagi bila harus menjalankan penilaian individual, seperti unjuk kerja pada berbicara, serta banyaknya kompetensi dasar; (4) waktu yang tersedia dengan materi dalam kompetensi dasar dirasa guru belum memadai jika siswa harus belajar membentuk konsep sendiri atau mencapai keterampilan, untuk mengatasi ini guru terpaksa memberikan tugas yang lebih banyak kepada siswa. Siswa mempunyai beban pekerjaan rumah yang lebih banyak; (5) guru masih kekurangan sumber belajar atau materi pembelajaran yang mendukung keterlaksanaan KBK, misalnya masih langkanya buku pelajaran bahasa Indonesia yang berbasis kontekstual, buku pendukung seperti kamus, dan buku sastra; (6) guru masih ragu dalam memberikan pembelajaran dan evaluasi, apakah sudah sesuai dengan KBK atau belum, dan bagaimana pada saat UAN, apakah sudah disesuaikan dengan KBK atau belum; (7) guru

membuatuhkan pelengkap pendukung pembelajaran bahasa Indonesia berbasis CTL dan sarana prasarananya (Misalnya TV atau VCD). Hal ini dirasakan guru saat guru harus menghadirkan konteks ke dalam kelas. Boleh anak diajak ke luar kelas terus dan tempatnya jauh, waktu dan biaya sangat besar; (8) masih langkanya buku siswa yang sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi. Selain itu, harga buku siswa di daerah mahal sehingga siswa dan sekolah kesulitan mendorong siswa untuk selalu membaca dan memantapkan penguasaan pembelajaran di sekolah; (9) guru kesulitan mengembangkan aspek mendengarkan karena di sekolah belum ada laboratorium bahasa.

Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, guru dan sekolah melakukan beberapa upaya: (1) guru mencari strategi baru sistem penilaian sehingga penilaian individual tercapai; (2) guru mencoba menggunakan peralatan pembelajaran seadanya, seperti dalam pembelajaran menyimak, guru membawa tipe recorder ke kelas; (3) melakukan diskusi dan pelatihan KBK intensif kepada teman dan guru lain; (4) menggendakan bahan-bahan ajar yang sesuai dengan KBK; (5) untuk materi-materi yang sulit, guru lebih banyak memberikan bimbingan (ceramah) dibanding dengan CTL; (6) guru sudah mengusulkan agar kelas jangan terlalu padat pada kepala sekolah; dan (7) guru mengusahakan bertanya tentang kejelasan kebijakan

yang berkaitan dengan evaluasi, UAN dan raport (jangan ada perbedaan antara yang telah diberikan di lapangan dengan evaluasi yang diberikan di UAN).

Kendala/Hambatan yang dihadapi Pengawas Bahasa Indonesia dan cara mengatasinya

Kendala yang dihadapi pengawas dalam melaksanakan pengawasan KBK antara lain: (1) pengawas belum memahamai sepenuhnya KBK. Pemahaman diperoleh dari mendengar dan membaca beberapa tulisan KBK, tetapi belum pernah melihat perangkat standar kompetensi mata pelajaran; (2) pemahaman tentang pembelajaran bahasa Indonesia oleh pengawas terbatas. Pembelajaran bahasa Indonesia disamakan dengan mata pelajaran lain; (3) pengawas belum mendapat pelatihan yang berkaitan dengan bidang studi, sehingga mengalami kesulitan dalam memberikan pengawasan dan pengarahan pada guru pada saat memeriksa silabus, RP, proses pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar.

Untuk mengatasi kendala tersebut pengawas bertanya pada teman sejawat yang telah memperoleh pelatihan walaupun bukan bidang studi bahasa Indonesia.

Saran Perbaikan

Saran-saran yang disampaikan guru, siswa, dan pengawas untuk perbaikan pembelajaran bahasa Indonesia. Saran

dari pegawai: (1) pengawas bidang studi perlu memperoleh pelatihan khusus yang menyangkut bidang studinya dan (2) guru-guru perlu mendapat pelatihan peningkatan kemampuan materi bahasa Indonesia, terutama materi yang baru dan cara menyampaikan materi tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh KBK. Hal ini perlu dilakukan karena masih terbatasnya buku atau bahan ajar untuk bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBK. Saran dari guru: (1) perlu kejelasan tentang evaluasi yang akan dilakukan, apakah seperti UAN sekarang atau sesuai dengan yang seharusnya dilakukan pada KBK (standar isi); (2) jumlah siswa jangan terlalu banyak (antara 30 orang s.d. 35 orang); (3) buku-buku dan sarana penunjang pembelajaran bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBK perlu diupayakan baik oleh sekolah maupun pemerintah; dan (4) perlu ada penamping, seperti konsultan yang bisa dijadikan mitra dan tempat bertanya, yang memahami secara utuh KBK bidang studi, bahasa Indonesia. Adapun saran dari siswa: (1) guru supaya memperhatikan siswa yang masih kesulitan belajar dan belum tuntas; (2) buku-buku pelajaran disediakan dan jangan terlalu banyak jika harus membeli; (3) sarana seperti kamus, buku cerita, laboratorium bahasa disediakan sehingga bila akan belajar gampang; dan (4) guru harus selalu siap untuk belajar sehingga siswa terdorong belajar giat.

Mekanisme Kerja Sama Antar-instansi

Pada bagian ini dideskripsi dan dibahas subtopik mekanisme kerja sama antarinstansi, terutama Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam rangka memperoleh titik temu antara kebutuhan praktisi dan teoretisi.

Mekanisme yang dapat dikembangkan untuk peningkatan implementasi standar isi di sekolah saat ini belum berjalan maksimal. Hubungan kerja sama instansi pendidikan, MGMP, dan perguruan tinggi, dan sekolah belum terjalin secara kompak. Selama ini masih berjalan sendiri-sendiri. Mereka bila membutuhkan hanya sekedar saling mengundang, tetapi tidak dalam satu keutuhan tim yang terikat pada tujuan pengembangan guru.

Karena itu, ke depan semestinya dibangun kerja sama antarinstansi yang terkait dengan pendidikan ini lebih kompak dan solit menuju satu tujuan pengembangan guru dan peningkatan mutu pendidikan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dikemukakan bahwa walaupun gagasan pengimplementasian kurikulum berbasis kompetensi (standar isi 2006) sudah dirintis sejak tahun 2006/2007 dan dibuatkan pedomannya, implementasinya di lapangan,

terutama untuk mata pelajaran bahasa Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini dibuktikan masih adanya guru-guru SMP/MTs yang menjadi subjek penelitian ini tidak menguasai dan menerapkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik.

Dengan demikian, bagi guru nampaknya adanya kebijakan bukanlah secepatnya direspon. Biarlah kebijakan muncul, tetapi cara pembelajaran bahasa Indonesia tetaplah, seperti apa yang telah berlaku sebelumnya. Nampaknya pemikiran bahwa mereka yang penting mengajar itu menjadi suatu kenyataan. Mereka ada yang mengatakan "Toh yang dipentingkan adalah mengajar. "Tugas saya adalah mengajar, urusan sesuai atau tidak dengan kurikulum kan sudah ada bukannya."

Bagi mereka, nampaknya anggapan ganti menteri ganti kebijakan sangat melekat. Artinya, bagi mereka kebijakan itu berganti karena menteri yang memimpin departemen itu berganti. Hal itu bukan karena pergantian kebijakan itu disebabkan oleh perubahan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, berarti sosikultural guru-guru SMP/MTs di Kota Semarang masih ada yang belum aspiratif dengan perubahan yang seharusnya selalu diikuti. Dengan demikian, guru yang seharusnya merupakan agen pembaharuan dan agen ilmu tidak dapat menjalankan peran itu dengan baik. Bias berikutnya bila siswa yang menjadi asuhannya

tidak mengalami perubahan atau perkembangan dalam hal ilmunya wajar saja terjadi.

Selama ini, mengapa guru tidak menjalankan aktivitasnya dengan baik karena hambatan sosioekonomi. Bila hambatan-hambatan yang ada, terutama hambatan sosioekonomi merupakan hambatan yang menjadi sentral perhatian, kondisi ini pun nampaknya tidak terlalu realistis bila mental dan kultur guru itu sendiri tidak berubah. Hal ini terbukti bahwa manusia itu selalu tidak terpuaskan. Yang terpuaskan adalah bila manusia itu mau merasa puas dan mensyukuri apa yang telah ada pada dirinya. Tanpa konsep itu tertanam di dalam diri guru kemungkinan untuk pengembangan atau peningkatan pendidikan kita agaknya berat.

Adapun bagi guru-guru yang ingin maju, mereka selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Guru-guru itu telah melaksanakan pengimplementasian budi pekerti walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Akan tetapi, hal itu lebih baik daripada yang tidak sama sekali.

Bagi guru dan sekolah ingin maju mencoba melaksanakan pembelajaran cara yang dilakukan dengan penekanan penguasaan buku ajar. Dengan demikian, sebenarnya pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia secara utuh belum dilaksanakan oleh guru atau sekolah. Akan tetapi, kepada mereka yang telah mencoba melakukannya itu jauh lebih baik.

Kepada mereka memiliki motivasi dan kreativitas yang tinggi mestinya mendapat perhatian. Kepada mereka pula kita seharusnya mengembangkan dan memberikan fasilitas dan kesejahteraan yang lebih.

Hal ini agar paling tidak dapat mengubah kondisi mental guru yang selama ini antara yang memiliki motivasi tinggi dan berkegiatan tinggi dengan yang tidak sama saja. Bila hal ini tidak diperhatikan maka kondisi pendidikan kita kemungkinan untuk menghasilkan SDM dini yang memenuhi perubahan zaman jauh dari harapan.

Simpulan Dan Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal antara lain: (1) secara umum pihak-pihak di lapangan, seperti guru bahasa Indonesia, dan sekolah (kepala sekolah) telah memahami hakikat KBK, tetapi masih dalam *tataran teoretik dan belum utuh*. Pada tataran implementasi (pelaksanaan), dari hasil wawancara dan pengamatan, terlihat bahwa masih ada guru yang masih mencoba-coba dan kurang yakin dengan model pembelajaran bahasa Indonesia dan evaluasi yang dilakukannya; (2) secara umum KD dalam kurikulum berbasis kompetensi untuk matapelajaran bahasa Indonesia dapat dilaksanakan, dengan segala kendala yang dihadapinya. Ada berapa kompetensi dasar yang terasa sulit dilaksanakan, seperti *berbalas pantun*; (3) kendala-

kendala yang dihadapi di sekolah, antara lain: Guru masih merasakan beban yang tinggi terhadap jumlah siswa yang terlalu banyak (di atas 40 orang); (4) sarana dan prasarana penunjang pembelajaran bahasa Indonesia yang belum memadai, bahan ajar yang sesuai dengan KBK masih terbatas dan juga media pembelajaran belum memadai dalam mendukung KBK, seperti televisi atau VCD yang belum ada di setiap kelas, laboratorium bahasa, kamus bahasa Indonesia, dan buku cerita atau buku sastra; (5) dalam memberikan evaluasi guru masih ragu, terutama bayang-bayang UAN. Hal ini karena belum ada kejelasan model evaluasi dan laporan hasil belajar untuk UAN versi KBK; (6) pada saat petugas melakukan pengamatan di kelas, guru yang menjadi objek pengamatan terlihat belum menguasai materi pembelajaran dan metode yang seharusnya di sampaikan sebagaimana dituntut dalam KBK. Pembelajaran CTL belum berjalan sesuai dengan unsur-unsur CTL yang berjumlah 7 butir. Hal ini terkesan sama dengan pembelajaran sebelum CTL; (7) pengawas bidang studi bahasa Indonesia khusus karena masih pengawas umum. Kendalanya bila pengawas dari bidang lain, yang lebih banyak diawasi bidang yang bersangkutan dengan pengawas. Adapun pengawasan kepada mata pelajaran bahasa Indonesia samnialu atau sekenanya. Di samping itu, pengawas belum mendapat pelatihan yang berkaitan dengan standar isi

secara khusus sesuai dengan bidang studinya, pemahanan standar isi diperoleh secara umum dari teman sejawat yang bukan pengawas bidang studi bahasa Indonesia sehingga pengawas kurang mantap dalam memberikan pengarahan, khususnya dalam pembuatan silabi, pembelajaran, dan sistem penilaian matapelajaran bahasa Indonesia; dan (8) dalam pembelajaran siswa masih mengikuti apa yang diberikan oleh guru sehingga metode dan strategi pembelajaran yang diberikan guru akan menentukan sekali terhadap karakter belajar siswa.

Rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi ujicoba pelaksanaan standar isi untuk mataperlajaran Bahasa Indonesia: (1) **kepala sekolah** perlu mengusahakan sarana pembelajaran, seperti lab bahasa dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan standar isi serta menyusun RAPBS; (2) **pengawas**, perlu ada pengawas bidang studi (bahasa Indonesia) yang mendapat pelatihan bersama guru bidang studi (bahasa Indonesia) sehingga apa yang dilakukan atau disarankan pengawas sinkron dengan apa yang seharusnya dilakukan guru, serta pengawas perlu memberikan pembinaan standar isi dan menyampaikan strategi pembelajaran baru sesuai standar isi, serta melakukan supervisi secara rutin dan jelas ke sekolah dan guru; (3) **guru** perlu mendapatkan pelatihan, baik di MGMP, propinsi atau tingkat nasional berkaitan dengan peningkatan

penguasaan materi dan metode penyampaian materi yang belum dikuasai oleh guru yang sesuai dengan standar isi secara utuh dan terkontrol. Perlu dibuat jaringan kerja antar-MGMP mata pelajaran sejenis untuk membangun komunikasi dalam upaya mendukung suksesnya KBK, khususnya peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia; (4) **komite sekolah** harus berperanserta aktif mengusahakan dana dari masyarakat; (5) **tata usaha** perlu bekerja keras menyiapkan format-format dan administrasi yang lengkap yang diperlukan guru; (6) **lingkungan sekolah** harus membantu memberikan pelayanan kepada siswa dalam belajar dengan jalan menciptakan lingkungan yang baik dan mau dijadikan model pembelajaran; (7) **pemerintah dalam hal ini diknas** perlu kejelasan kebijakan yang berkaitan dengan evaluasi akhir, baik bentuk tes, jenis tes, dan tahap-tahap tes sehingga evaluasi Ujian Akhir Nasional (UAN) yang telah disesuaikan dengan KBK tidak ada keraguan pada guru dalam melakukan evaluasi; perlu kejelasan model laporannya (*raport*), baik aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Perlu kelas yang ideal menurut versi dan tuntutan KBK; dan untuk tahap awal pelaksanaan KBK perlu adanya pendamping sekolah, seperti konsultan yang bisa dijadikan mitra dan tempat bertanya, yang memahami secara utuh KBK bidang studi bahasa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Azies, F. dan A. Ch. Alwasilah. 1996. *Pengajaran Bahasa Komunikatif: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Depdikbud. 1993/1994. *Kurikulum Pendidikan Dasar: Garis-Garis Besar Program Pengajaran: GBPP SLTP Kelas I-III: Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdikbud. 1993/1994. *Kurikulum Pendidikan Dasar: Landasan, Program, dan Pengembangan*. Jakarta: Depdikbud.
- Puskur. 1999. *Potret Kurikulum 1994*. Jakarta: Balitbang Depdikbud.
- Puskur. 2001. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kebijakan Umum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdikbud.
- Puskur. 2001. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kebijakan Umum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Puskur-Balitbang Dikbud.
- Puskur. 2001. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Abstrak Kompetensi*. Jakarta: Puskur-Balitbang Dikbud.
- Depdiknas. 2003. *Standar Nasional Kemampuan Dasar SD/SD, SLTP/MTs, SMU/MA*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdiknas. 2001. *Bahan Sosialisasi Pengembangan Kurikulum Berbasis Kemampuan Dasar Sekolah Menengah Umum*. Jakarta: Dikmenum
- Hartono, Bambang, dkk. 2000. Model Pengembangan Pembelajaran Integratif Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia bagi Guru-Guru SD di Jawa Tengah. Laporan Penelitian. Semarang: Lembaga Penelitian Unnes Semarang.
- Hartono, Bambang. 2002. Kurikulum Bahasa Indonesia Berbasis Kompetensi: Pendekatan, Pengorganisasian Materi, dan Rambu-rambu Pembelajaran. Makalah Disampaikan pada Diskusi Ilmiah dalam Rangka Studi Banding Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Universitas Negeri Yogyakarta di Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Universitas Negeri Semarang 2 Maret 2002.
- Hartono, Bambang dkk. 2004. *Panduan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk MI dan MTs*. Semarang: Kanwil Depag Jateng.
- Hartono, Bambang. *Panduan Penyusunan KTSP MI, MTS, dan MA*. Bahan Sosialisasi Pengembangan KTSP di Madrasah. Semarang: Kanwil Depag Jateng.
- Mulyana, E. 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasinya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Puskur. 2002. *Abstrak Framework Kurikulum dan Hasil Belajar*. Puskur-Balitbang Depdiknas.
- Puskur. 2002. *Pengembangan Silabus Kurikulum Berbasis Kompetensi*.

- Jakarta: Puskus, Balitbang Depdiknas.
- Silverius, Suke. 2002. Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan dalam *Selintas Pendidikan Indonesia di Akhir 2002 (Delapan Isu Pendidikan)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balitbang
- Diknas, Pusat Data dan Informasi Pendidikan,
- Sudijarto. 2003. "Universitas dan Peran Strategisnya dalam Pembangunan Negara Bangsa dalam Era Globalisasi". Makalah *Semiloka Pengembangan Paradigma Pendidikan di Universitas Negeri Semarang*. Semarang, 31 Mei 2003.